

**PROPOSAL
PENELITIAN UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



JUDUL PENELITIAN

**PARADIGMA HUKUM PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN
DESA TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

PENGUSUL:

**DR. HIERONYMUS SOERJATISNANTA, S.H., M.H. (KETUA)
(NIDN 0030096102, SINTA ID 5995528)**

**FATHONI, S.H., M.H. (ANGGOTA)
(NIDN 0226088201, SINTA ID 5989149)**

**KATEGORI
(Penelitian Terapan)**

**BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN UNGGULAN (PU)
UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : Paradigma Hukum Pancasila Sebagai Dasar
Membangun Desa Tangguh Bencana di
Kabupaten Lampung Selatan

Manfaat sosial ekonomi : (a) Mengembangkan regulasi manajemen bencana
(b) Mengembangkan modul pelatihan penanggulangan
bencana

Jenis penelitian : Penelitian Terapan

Ketua Peneliti


a. Nama Lengkap : Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H.
b. NIDN : 0030096102
c. SINTA ID : 5995528
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
e. Program Studi : Ilmu Hukum
f. Nomor HP : 08127953199
g. Alamat surel (e-mail) : eronymus.soerjatisnanta@fh.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

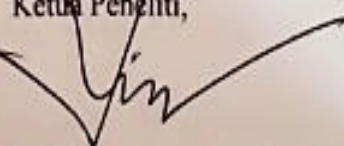
a. Nama Lengkap : Fathoni, S.H., M.H.
b. NIDN : 0226088201
c. SINTA ID : 5989149
d. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 5 (lima) orang
Jumlah alumni yang terlibat : 2 (dua) orang
Jumlah staf yang terlibat : -
Lokasi kegiatan : Provinsi Lampung
Lama kegiatan : 6 (enam) bulan
Biaya Penelitian : Rp35.000.000,00
Sumber dana : Skim Penelitian Unggulan (PU) Universitas
Lampung T.A. 2019

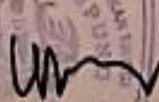
Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP196003101987031002

Bandar Lampung, 25-02 2019
Ketua Peneliti,


Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H.
NIP 196109301987021001

Menyetujui
Ketua LPPM Unila


Ir. Warsono, M.S., Ph.D
NIP. 196302161987031003

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS LAMPUNG

1. Judul Penelitian : Paradigma Hukum Pancasila Sebagai Dasar Membangun Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lampung Selatan

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H.	Ketua	Legal Drafting	Ilmu Hukum	20
2.	Fathoni, S.H., M.H.	Anggota 1	Hukum Lingkungan	Ilmu Hukum	20

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segipenelitian):

Kebijakan Penanganan Bencana di Indonesia dan Provinsi Lampung

4. MasaPelaksanaan

Mulai : bulan Juni tahun2019

Berakhir : bulan Nopember tahun2019

5. UsulanBiaya : Rp. 35.000.000,00

6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan)Provinsi Lampung

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apakontributornya)

Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Selatan terutama BPBD untuk penyediaan data kebijakan penanganan bencana di daerah sebagai sampel Provinsi Lampung

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)

Mengembangkan paradigma hukum Pancasila dalam penanggulangan bencanaberdasarkan prinsip kemanusiaan, kemitraan dan gotong royong yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.Orientasi tersebut dilakukan berdasarkanpada modal sosial dan kearifan lokal masyarakat Lampung sesuai dengan cita hukum Pancasila.

9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima Hibah Penelitian Unggulan (Nasional/ Internasional)

1. Jurnal Ilmu Hukum FIAT JUSTISIA (Sinta 2/DOI) Fakultas Hukum Unila

2. Prosiding pada the 2nd International Conference on Fundamental Rights (I-Coffees)Tahun 2019

RINGKASAN

Tahapan penanggulangan bencana meliputi (a) pra bencana, (b) saat tanggap darurat, dan (c) pasca bencana, yang dilaksanakan dalam kerangka hukum Pancasila dan Konstitusi. Paradigma hukum Pancasila tertuang dalam asas-asas hukum dan prinsip-prinsip penanganan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 tahun 2007. Paradigma hukum Pancasila mengedepankan nilai kemanusiaan dan gotong royong serta pranata dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial. Dalam implementasinya tidak dapat dilepaskan dengan aspek peraturan perundangan, kelembagaan dan budaya masyarakat. Namun, harus diakui bahwa masyarakat seringkali gagal menghadapi bencana pada setiap tahapan penanganan bencana. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya dan kebijakan strategis untuk memperkuat implementasi aturan hukum (UU No. 4 tahun 2007) dengan memberdayakan modal sosial untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kebijakan dimaksud bukan hanya pada tingkat pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten, tetapi juga pemerintahan desa sebagai ujung tombaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah dengan memberdayakan modal sosial yang hidup dalam masyarakat sehingga terbangun ketangguhan dan kemandirian daerah dalam menghadapi bencana pada setiap tahapan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah *socio legal* yang bersifat kualitatif. Tahapannya meliputi inventarisasi dan analisis normatif bahan hukum (desk evaluation) dan penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, FGD, dan penelusuran dokumen yang dilakukan dalam kerangka memperkuat kebijakan hukum

Upaya memperkuat dilakukan dengan mengkonstruksikan kembali hubungan antara aspek peraturan dan kelembagaan dengan tahap-tahap penanganan bencana. Rekonstruksi dilakukan dengan menempatkan nilai Pancasila dan nilai kearifan lokal masyarakat Lampung yaitu *piil peseng giri* dengan berbagai elemen nilai yang terkandung didalamnya sebagai modal sosial untuk mewujudkan daerah tangguh bencana. Locus penelitian yang dipilih adalah kabupaten Lampung Selatan dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut mempunyai tingkat kerentanan bencana alam yang cukup tinggi, khususnya dengan keberadaan Anak Gunung Krakatao.

Tahapan pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (a) pemetaan peraturan dalam kerangka sistem hukum positif, (b) pemetaan kelembagaan, (c) pemetaan modal sosial yang ada dilokasi penelitian. Dari pemetaan tahap pertama akan diperoleh asas dan prinsip penanganan bencana dengan mempertimbangkan tahapan penanganan bencana, pranata sosial dan modal sosial masyarakat. Pada tahap kedua penelitian, dilakukan simulasi kembali interaksi hubungan antara peraturan perundangan dan kelembagaan dengan asas dan prinsip penanganan bencana. Simulasi ini akan menghasilkan model daerah tahan/tangguh bencana yang berbasis pada pranata dan nilai kearifan lokal yang merupakan modal sosial dalam menghadapi setiap tahapan bencana. Model tersebut kemudian dirumuskan dalam policy brief dan/atau naskah akademik peraturan di tingkat kabupaten atau desa.

Luaran penelitian ini adalah policy brief kebijakan daerah dan/atau naskah akademik peraturan desa tentang desa tangguh/tahan bencana berbasis pada modal sosial (TKT 6). Selain itu, luaran penelitian ini adalah artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi (Fiat Yustisia – Sinta 2) dan Artikel yang akan dipresentasikan dalam International Conference on Fundamental Rights (I-Coffees) Tahun 2019

Kata Kunci: Paradigma, Hukum Pancasila, Desa, Tangguh Bencana, Lampung Selatan

BAB 1 LATAR BELAKANG

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Beberapa catatan bencana alam besar yang pernah terjadi di Provinsi Lampung.¹ Peristiwa bencana tersebut sudah selayaknya menjadi pengalaman untuk pembelajaran untuk mengantisipasi agar kerugian dan korban dapat diminimalisasi melalui manajemen bencana. Secara hukum, penanggulangan bencana di Indonesia telah diatur dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan kemudian diikuti dengan berbagai peraturan pelaksanaan baik di tingkat pusat, sektoral maupun daerah.

Berdasarkan UU, proses penanggulangan bencana dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) pra bencana; (2) saat bencana/tanggap darurat; dan (3) pasca bencana, sesuai dengan kerangka manajemen bencana. Namun, pada setiap bencana yang terjadi, fokus penanggulangan seringkali hanya focus penanganan pada saat tanggap darurat (saat terjadi bencana). Dewald (2015) mengemukakan bahwa manajemen risiko bencana di negara berkembang hanya merupakan retorika akademik.² Tahapan pra bencana dan pasca bencana seringkali terabaikan, sehingga masalah penanggulangan bencana tidak terselesaikan dengan baik. Di sisi lain, pada saat tanggap darurat, berbagai permasalahan seringkali muncul, antara lain terkait dengan distribusi bantuan, kecurigaan asal bantuan dan sebagainya, sebagaimana dikemukakan oleh damayanti (2016)³ dan M Alie Humaedi (2015).⁴ Oleh karena itu penanganan bencana selayaknya memperhatikan dimensi sosial sebagaimana dikemukakan oleh Samsul Maarif (2016).⁵ Keberadaan UU Penanggulangan Bencana, telah diakui bahwa substansi pengaturannya sudah cukup baik, sebagaimana hasil laporan dari International Federation Of Red Cross

¹ Dari berbagai sumber dapat disajikan data antara lain (1) Gempa Bumi Liwa (15 Februari 1994, 6,5 skala Richter) mengakibatkan 196 orang tewas, lebih dari 2.000 orang luka-luka, dan lebih dari 75.000 rumah yang hancur.; (2) Erupsi Gunung Anak Krakatau; (3) Tsunami yang diakibatkan longsoran material Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang berdampak 116 orang meninggal dunia di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

²Lihat kajian, Dewald Van Niekark.,2015., Disaster Risk Reduction, *Disaster Risk Managemant And Disaster Managemant: Academic Rhetoric Or Practical Reality?* Research Focus Area 7.2: Sustainable Social Development. North-West University, Potchefstroom Campus.

³Wardyaningrum, Damayanti., 2016. *Model Sosial Inklusif Dalam Jaringan Komunikasi Bencana. Jurnal Aspikom*, Volume 3 Nomor 1, Hlm 33-55.

⁴Alie. M Humaedi, 2015. *Disaster Management Based On The Perspective Of Inter-Relegious Conection And Lokal Wisdom. Analisa Journal Of Social Science And Religion*. Volume 22 No. 02, Halaman 213-226.

⁵Syasul Maarif., Rilus A.,Kinseng., Rudy Pramono., 2016. *Dimensi Sosial Dalam Penanganan Bencana (Studi Kasus Pananganan Gempa Bumi Di Kecamatan Pengalengan, Management (Case Studi: Earthquake Disaster At Pangalengan Sub District, Bandung)*. Jurnal Riset Kebencanaan Indonesia. Julnal Riset Kebencanaan Indonesia Vol. 2 No.2.

And Red Crescent Societies (2015).⁶ Namun, dibutuhkan upaya untuk memperkuat implementasinya, terutama berkenaan dengan kebijakan meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana yang bersandarkan pada modal sosial.

Atas dasar uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan bahwa urgensi penelitian ini berkenaan dengan upaya pembentukan struktur dan mekanisme setiap tahapan bencana secara sistematis dengan berlandaskan pada nilai hukum Pancasila dan nilai kearifan-lokal sebagai modal sosialnya.⁷ Sesuai dengan locus penelitian, maka output dari penelitian ini diorientasikan untuk dapat diimplementasikan di Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah rawan bencana.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari model daerah tangguh bencana di lokasi penelitian sehingga dapat memperkuat kebijakan kebencanaan di daerah. Upaya dilakukan dengan memperkuat regulasi basis komunitas tangguh bencana, baik secara fungsional maupun struktural. Makna secara fungsional adalah memperkuat regulasi peran serta komunitas kemanusiaan dalam penanganan bencana pada setiap tahapan. Sedangkan makna secara struktural adalah memperkuat peran pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menghadapi bencana dengan memberdayakan nilai kearifan lokal. Peran aktif pemerintah desa dalam penanganan bencana dituangkan secara komprehensif dalam bentuk Peraturan desa sesuai dengan kewenangannya.

⁶ Laporan Penilaian, 2015, *International Federation Of Red Cross And Red Crescent Societies. Memperkuat Undang-Undang Dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Di Indonesia*

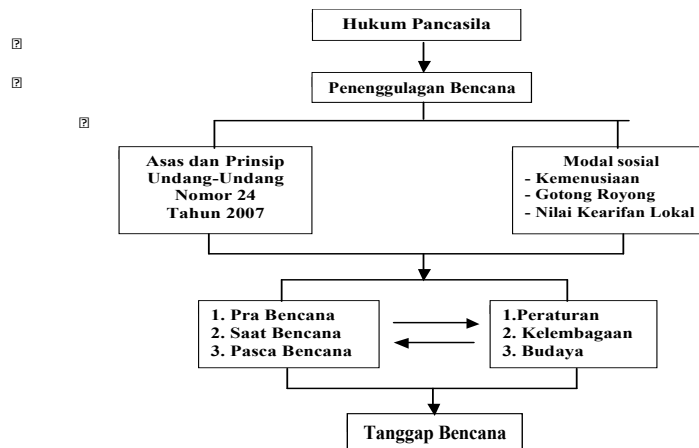
⁷ Lihat Ginanjar Kartasmita, *Memperkuat Modal Sosial Dalam Menghadapi Bencana*, Makalah Disampaikan Pada Acara Dies Natalis Universitas Paramadina ke 19, Jakarta 10 Januari 2017.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Penanggulangan Bencana

Paradigma Hukum Pancasila dalam penanggulangan bencana tertuang dalam asas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 tahun 2007. Sebagai bagian dari sistem hukum, UU tersebut tidak dapat dilepaskan dari cita hukum Pancasila, baik dalam tataran teoritis maupun praktek hukum.⁸ Dalam kerangka sistem hukum maka penanganan bencana akan senantiasa berkaitan dengan aspek substansi, struktur dan budaya serta bekerjanya fungsi-fungsi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedman.⁹ Sedangkan asas dan Prinsip tersebut tidak terlepas dari nilai Pancasila yang merupakan modal sosial untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi semua bentuk bencana yang niscaya dapat terjadi kapan pun. Modal sosial yang penting untuk dipetakan yang diorientasikan pada upaya untuk membangun sebuah sikap dan perilaku tanggap bencana yang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

Bagan 2.1. Alur Pikir Paradigma Hukum Pancasila dalam Penanggulangan Bencana



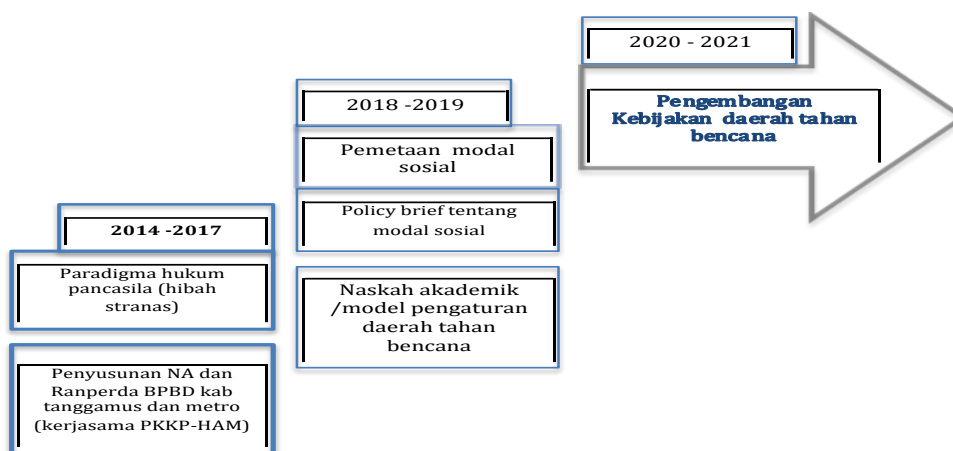
Penelitian ini merupakan sebuah rangkaian dari penelitian dan proses advokasi kebijakan yang pernah dilakukan. Pengalaman peneliti dalam menyusun naskah akademik dan Perda Penanggulangan Bencana Kota Metro (2015), Perda BPBD Kabupaten Tanggamus (2017), serta rumusan Hukum Pengayoman sebagai karakter Hukum Pancasila melalui skema penelitian hibah stranas, merupakan standing point dalam penelitian ini. Roadmap penelitian dan tahapan lebih lanjut dapat digambarkan

⁸ Lihat B Arief Sidharta, 2013, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, Gentha Publishing, Yogyakarta.

⁹ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

bagan berikut.

Bagan 2.2. Roadmap Penelitian



2.2. Modal Sosial dan ketangguhan daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang paling terdampak bencana, dengan risiko beragam bencana yang berbeda setiap tahunnya. Posisi geografis dan sebagai negara kepulauan, Indonesia berada dalam risiko bahaya yang meliputi banjir, tanah longsor dan gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi, tsunami, badai tropis dan kebakaran hutan. Gambaran besar kerentanan Wilayah Indonesia tersebut juga terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, karena kontur geografi dan keberadaan anak gunung Krakatau yang sangat aktif membutuhkan kesiapsiagaan atas ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor yang senantiasa mengancam jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kerentanan ini membutuhkan kesiapsiagaan bencana yaitu upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat (individu, kelompok, organisasi) dapat mengatasi bahaya peristiwa alam.

Dari rumusan definisi bencana dalam UU No. 24 tahun 2007, dapat dipaparkan tiga aspek dasar, yaitu: (a) Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (*hazard*); (b) Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi □ dari masyarakat; (c) Ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat □ untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. □ Bencana dapat terjadi, karena ada dua kondisi yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*) masyarakat. Bila terjadi *hazard*, tetapi masyarakat tidak rentan, maka berarti masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa yang mengganggu, sementara bila kondisi masyarakat rentan, tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam maka tidak akan terjadi bencana.

Oleh sebab itu dibutuhkan upaya kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana.

Kesiapsiagaan bencana diselenggarakan dalam kerangka asas-asas dan prinsip-prinsip hukum Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Asas dan Prinsip tersebut tidak terlepas dari nilai Pancasila yang merupakan modal sosial untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi semua bentuk bencana yang niscaya dapat terjadi. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan penanganan bencana dirumuskan dalam tiga tahapan yaitu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Namun, harus diakui bahwa penanganan bencana sering kali hanya terfokus pada saat terjadinya bencana. Pada saat terjadi bencana, semua elemen akan bergerak dalam berbagai bentuk kegiatan. Namun, setelah masa tanggap darurat selesai maka permasalahan seolah juga sudah selesai. Seharusnya, dari bencana yang terjadi menjadikan pengalaman dan sarana belajar bahwa hidup di wilayah rentan bencana harus siap siapa karena bencana niscaya akan terjadi. Dalam hal ini, kesiapsiagaan pada tahap pra bencana merupakan tahapan penting yang harus dipersiapkan oleh masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Arti penting kesiapsiagaan masyarakat adalah untuk meminimalisasi kemungkinan korban sebagai dampak yang merugikan yang diakibatkan oleh hazard dan/atau vulnerability (kerentanan).

Di sisi lain, kesiapsiagaan juga mempunyai arti penting dalam tahapan pasca bencana. Dampak psikologis bencana membutuhkan sikap mandiri dari masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan atas bencana yang terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah langkah pembentukan struktur dan mekanisme tanggap darurat yang sistematis agar masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana yang terjadi. Untuk memperkuat implementasi ketentuan tentang penanggulangan bencana, diperlukan penguatan modal sosial. Konsep dan definisi modal sosial senantiasa terkait dengan nilai atau semangat yang dilandasi oleh *trust*, *goodwill*, *reciprocity*, *solidarity*, *civic engagement*. Berbagai penulis memberi penekanan pada *trust*, yang oleh Fukuyama (1995, 1997) diartikan sama dengan modal sosial, dan oleh Coleman sebagai sebuah wujud modal sosial, sedangkan oleh Lin (1999) sebagai aset kolektif yang dihasilkan oleh modal sosial. Penulis lain memberi penekanan pada *goodwill* (Adler, Kwon, 2002) sebagai sumber modal sosial.¹⁰

Masyarakat Lampung memiliki modal sosial yang berkaitan dengan jiwa

¹⁰ Ginandjar Kartasasmita, *Memperkuat Modal Sosial Dalam Menghadapi Bencana*. Makalah Disampaikan dalam Acara Dies Natalis Universitas Paramadina ke-19 Jakarta, 10 Januari 2017. Hlm. 2

kegotong-royongan, empati, dan kedermawanan yang selama ini telah kuat, sehingga harus diperkokoh. Rasa kemanusiaan yang timbul dan diperkuat dengan pandangan hidup masyarakat Lampung berupa “*Pi'il Pesenggiri*”¹¹, terutama “*Sakai Sambayan*” yang berarti gotong-royong, “*Nemui Nyimah*” yang berarti keikhlasan untuk hidup rukun bermasyarakat, “*Nengah Nyappur*”, mudah bergaul dan toleran, dan “*Bejuluk Beadek*”, yaitu mempertahankan identitas/nama baik.

Keseluruh potensi modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Lampung dalam penanggulangan bencana harus diperkuat (*empowering*), sehingga terbentuk kesiapsiagaan bencana dalam semua tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Kesemua tahapan tersebut memiliki permasalahan tersendiri, sehingga harus disusun penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu yang memperhatikan aspek *good governance* dan sikap kehati-hatian yang pada akhirnya akan mengurangi risiko bencana dan membentuk masyarakat yang tangguh bencana. Dengan demikian terbangun tatanan masyarakat dalam suatu kesatuan wilayah yang tangguh bencana.

¹¹*Pi'il Pesenggiri* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, prilaku, dan sikap hidup yang dapat menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun secara berkelompok yang senantiasa dipertahankan. Dalam hal-hal tertentu seseorang (Lampung) dapat mempertaruhkan apa saja (termasuk nyawanya) demi untuk mempertahankan *Pi'il Persengirinya* tersebut. Selain dari itu dengan *Pi'il Pesengirinya* seseorang dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kendatipun hal itu merugikan dirinya secara materi.

BAB 3. METODE

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode *socio legal approach*, yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana. Sesuai dengan karakter keilmuan ilmu hukum sebagai ilmu praktikal yang normologi otoritatif, juga digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹² dalam kerangka sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila menempatkan modal sosial masyarakat sebagai asas dan prinsip penanganan pada setiap tahap penanganan bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

3.2. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Pengumpulan data yang dilakukan meliputi tiga tahapan yaitu (a) pemetaan sistem hukum positif yang mengatur penanganan bencana; (b) pemetaan kelembagaan yang menangani bencana; (c) pemetaan aspek sosial budaya. Pemetaan ini diorientasikan untuk merumuskan daerah/wilayah/masyarakat tahan bencana yang berbasis pada komunitas.

Pemetaan sistem hukum dilakukan melalui analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan penanganan bencana. Pemetaan asas dan prinsip serta peraturan perundangan yang mengatur tentang penanganan bencana merupakan landasan untuk memperkuat pengaturan dan implementasi pelaksanaannya. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum ini meliputi aspek wewenang, kelembagaan, dan prosedur yang diletakan dalam konteks pemahaman prosedur penanganan bencana atau manajemen penanganan bencana.

Pemetaan aspek sosial budaya ditujukan untuk mengumpulkan data lapangan dilakukan melalui studi dokumen, indepth interview dan *focus group discusion* dengan para pemangku kepentingan penanganan bencana yaitu antara lain BPBD, Aparat Pemerintahan desa, organisasi dan komunitas yang aktif dalam penangan bencana. Data

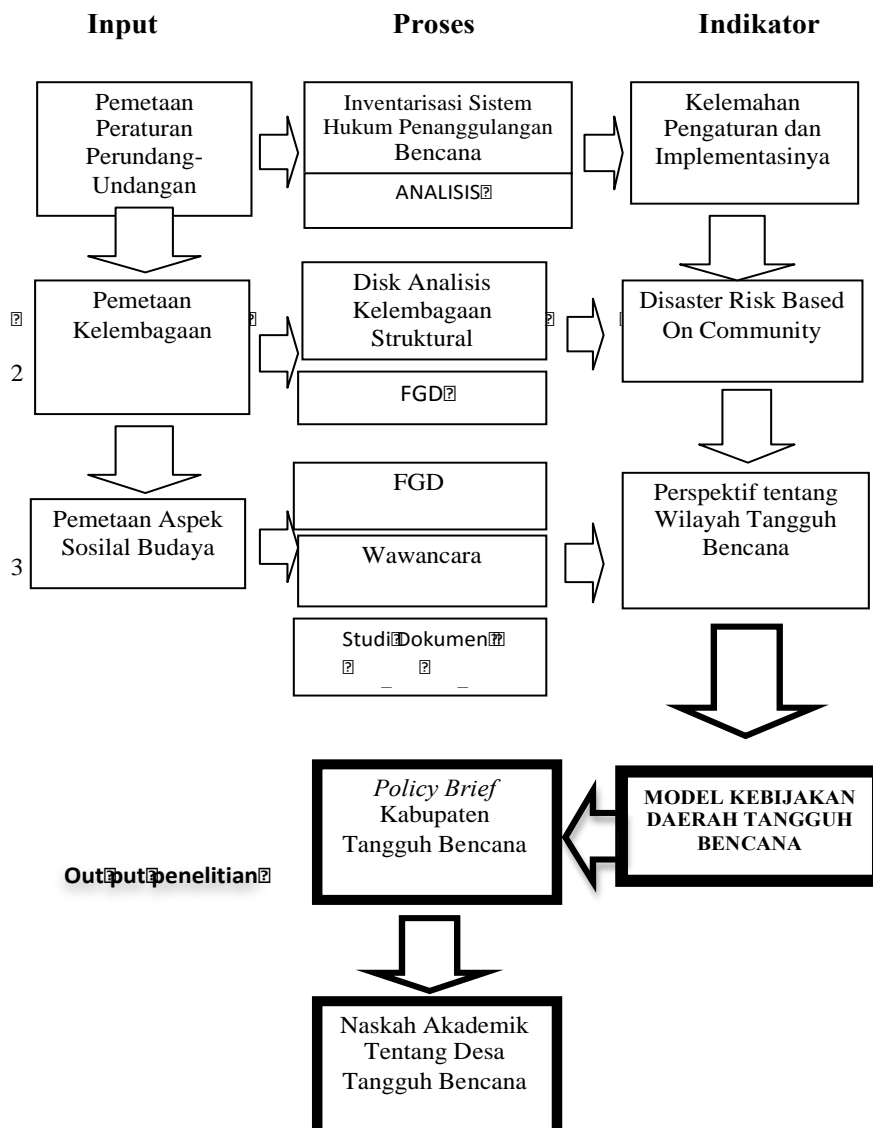
¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2005

lapangan dianalisis mengikuti model Miles dan Huberman (1992), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

3.3. Tahapan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan yang dapat digambarkan dalam bagan berikut :

Bagan 3.1. Tahapan Penelitian



BAB 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

4.1.LUARAN WAJIB

No	JENIS LUARAN	PUBLIKASI	PENERBIT
	Artikel yang akan disubmit pada Seminar Internasional I-Coffees FH Unila, 2019	Jurnal Terakreditasi / ber-ISSN	Kantor Staf Pengelola Seminar Internasional
	Artikel yang akan disubmit pada Jurnal Nasional Sinta 4 (DOI)	Jurnal Fiat Justisia	Fakultas Hukum Unila

4.2.LUARAN TAMBAHAN

Luaran tambahan berupa “Model Penanggulangan Bencana” yang berupa:

1. *Policy brief* tentang Desa Tangguh Bencana, yang berisi tentang pembentukan struktur dan mekanisme setiap tahapan bencana secara sistematis dengan landasan Pancasila dan kearifan lokal; dan
2. Naskah Akademik tentang Peraturan Daerah tentang Desa Tangguh Bencana.

BAB 5. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian Unggulan Universitas Lampung Tahun

2019 ini adalah sebagai berikut

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROPOSAL PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019

Penyusunan RAB mengacu pada PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019

Nama Pengusul : DR. HIERONYMUS SOERJATISNANTA, S.H., M.H.
Instansi : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
Judul Penelitian : Paradigma Hukum Pancasila Sebagai Dasar Membangun Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Lampung Selatan

I Rekapitulasi Biaya:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Satuan	Persentase	Maksimum
1	Pengadaan Alat dan Bahan	Rp 11.800.000		34%	50%
2	Travel Expenditure	Rp 10.400.000		30%	40%
3	Belanja Bahan Habis Pakai	Rp 5.900.000		17%	20%
4	Laporan/Diseminasi/Publikasi	Rp 6.900.000		20%	20%
	Jumlah Biaya	Rp 35.000.000		100%	

Terbilang: Tiga Puluh Lima Juta Rupiah

II. Rincian Realisasi Penggunaan Dana (termasuk pajak)

1. Pengadaan Alat dan Bahan

No.	Pelaksana Kegiatan	Volume	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Media Recording	2	Unit	1.000.000	Rp 2.000.000
2	Flashdisk	3	Unit	100.000	Rp 300.000
3	Modem	1	Unit	300.000	Rp 300.000
4	Tonner Tinta Laser	2	Kali	250.000	Rp 500.000
5	Cartridge Inkjet Black	2	Unit	450.000	Rp 900.000
6	Cartridge Inkjet Color	2	Unit	500.000	Rp 1.000.000
7	Perlengkapan Penelitian	1	Paket	2.000.000	Rp 2.000.000
8	Paket Data Internet	6	bulan	300.000	Rp 1.800.000
9	Sewa Alat Kantor (Printer, LCD)	6	bulan	500.000	Rp 3.000.000
	Jumlah				Rp 11.800.000

2. Travel Expenditure

No.	Uraian	Volume	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Sewa Kendaraan	3	Ls	2.000.000	Rp 6.000.000
2	Akomodasi pencarian data (luar kota) (4 org, 2 hari)	8	OH	350.000	Rp 2.800.000
3	Biaya Penginapan (2 kamar x 2 malam)	4	pax	400.000	Rp 1.600.000
	Jumlah				Rp 10.400.000

3. Belanja Bahan Habis Pakai

No.	Uraian	Volume	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Bahan Cetak	1	Paket	1.000.000	Rp 1.000.000
2	Kertas A4 80/gr	5	Paket	40.000	Rp 200.000
3	Biaya korespondensi	3	Paket	500.000	Rp 1.500.000
4	Fotokopi	1.000	Lembar	200	Rp 200.000
5	Pengadaan Literatur	1	Paket	3.000.000	Rp 3.000.000
	Jumlah				Rp 5.900.000

4. Laporan/Diseminasi/Publikasi

No.	Uraian	Volume	Satuan	Biaya Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Penggandaan Proposal	5	eks	25.000	Rp 125.000
2	Penggandaan Laporan Akhir	5	eks	50.000	Rp 250.000
3	Penyusunan Laporan Keuangan (meterai, dll)	1	Paket	150.000	Rp 150.000
4	Diseminasi Penelitian (konsumsi)	1	Paket	1.000.000	Rp 1.000.000
5	Biaya Penulisan Artikel	1	Paket	1.000.000	Rp 1.000.000
6	Biaya Translate Artikel	10	hlm	100.000	Rp 1.000.000
7	Biaya Registrasi Seminar Internasional	1	Ls	1.000.000	Rp 1.000.000
8	Biaya Submit Artikel	1	Paket	750.000	Rp 750.000
9	Dokumentasi Kegiatan	1	Paket	1.625.000	Rp 1.625.000
	Jumlah				Rp 6.900.000

BAB 6. JADWAL

Jadwal kegiatan penelitian unggulan (PU) ini direncanakan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan yang akan mengikuti timeline sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan/penyusunan proposal/rencana kegiatan	■					
2	Pengumpulan bahan hukum	■					
3	Pengumpulan data lapangan	■	■				
4	Turun Lapang/FGD		■	■	■		
5	Penyusunan Laporan Kegiatan				■	■	■
6	Penyusunan Draft: Policy Brief, naskah akademik, Jurnal dan Submit					■	■

DAFTAR PUSTAKA

- Alie. M Humaedi, 2015. "Disaster Management Based On The Perspective Of Inter-Religious Connection And Lokal Wisdom". *Journal of Social Science and Religion*. Volume 22 No. 02, 2015
- Anuar Alias, Mohd Nasir Daud., 2015. *Payment of Adequate Compensation for Land Acquisition in Malaysia*. Pacific Rim Property Research Journal, Vol 12, No 3.
- B Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Gentha Publishing, Yogyakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Laporan Utama Jilid 2-2: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2009. *Kajian Tentang Penanggulangan Bencana Alam Di Indonesia.*,
- Craig Johnson, Arpana Chakravarty., 2013. *Re-Thinking the Role of Compensation in Urban Land Acquisition: Empirical Evidence from South Asia*. Land..
- Dr. Dewald Van Niekark., 2015., Disaster Risk Reduction, *Disaster Risk Management And Disaster Management: Academic Rhetoric Or Practical Reality?* Research Focus Area 7.2: Sustainable Social Development. North-West University, Potchefstroom Campus.
- Harmadi, Djumilah Hadiwijoyo, Solimun, Faturachman ., 2014. *Land Acquisition Cijago Toll Road Development In Depok City, West Java Indonesia* .Journal of Business and Management . Volume 16, Issue 5. Ver. III .
- International Federation Of Red Cross And Red Crescent Societies. *Memperkuat Undang-Undang Dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Indonesia* | Laporan Penilaian Berdasarkan Daftar Periksa., Jakarta: PMI, IFRC, RCS, 2015
- Kartasasmita, Ginandjar., 2017., *Memperkuat Modal Sosial Dalam Menghadapi Bencana*. Pidato Acara Dies Natalis Universitas Paramadina ke-19.
- Klaus Deininger, Harris Selod, Anthony Burns ., 2012. *The Land Governance Assessment Framework The Land Governance Assessment Framework, Identifying And Monitoring Good Practice In The Land Sector*. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW.
- Lukas Sihombing, Budi S. Soepandji , Ismeth S. Abidin , Yusuf Latief., 2010. *The Impact of Land Acquisition Delay in Toll Road Development*. SSRN Electronic Journal.
- Mohd. Robi Amri, Gita Yulianti, Ridwan Yunus, Sesa Wiguna, Asfirmanto W. Adi, Ageng Nur Ichwana, Roling Evans Randongkir, Rizky Tri Septian., 2016., *Resiko Bencana Indonesia*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- Nadeera Ahangama., Raj Prasanna., 2015. "Disaster Risk Management And Resilience: What Remains Untouched?" *Journal Of Management*. Vol. 1 No. 1.

- OCHA-ROAP Regional Office for Asia and the Pacific, *Respon Bencana di Asia dan Pasifik, Panduan Perangkat dan layanan internasional. Judul asli: Disaster Response in Asia and the Pacific: A Guide to International Tools and Services*. OCHA-ROAP Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok 10200, Thailand.
- Pranab Bardhan, 2011, *Land Acquisition: Currently A Major Stumbling Block for Development Policy*, World Bank
- Purnama, Sang Gede., 2017. *Modul Manajemen Bencana.*, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Program Studi Kesehatan Masyarakat.
- Satish Modh., 2010., *Introduction To Disaster Managemant*. Macmillan Publishers India.
- Subash Ghimire, Arbind Tuladhar, Sagar Raj Sharma., 2017. *Governance in Land Acquisition and Compensation for Infrastructure Development*. American Journal of Civil Engineering. Vol. 5, No. 3.
- Susan L Cutter, Howard Kunreuther, Bernard P Amadei, Monica Schoch-Spana., 2013. *Disaster Resilience: A National Imperative*. Environment: Science and Policy for Sustainable Development.
- Syamsul Maarif., Rilus A., Kinseng., Rudy Pramono., 2016. *Dimensi Sosial Dalam Penanganan Bencana (Studi Kasus Pananganan Gempa Bumi Di Kecamatan Pengalengan, Management (Case Studi: Earthquake Disaster At Pangalengan Sub District, Bandung)*. Jurnal Riset Kebencanaan Indonesia. Jurnal Riset Kebencanaan Indonesia Vol. 2 No.2. .
- Vince Mangioni. *Just Terms Compensation And The Compulsory Acquisition Of Land*.
- Wardyaningrum, Damayanti., 2016. *Model Sosial Inklusif Dalam Jaringan Komunikasi Bencana*. Jurnal Aspikom, Volume 3 Nomor 1
- William J. McConnell, and Andrés Viña., 2018. *Interactions between Food Security and Land Use in the Context of Global Change*. Land , 7, 53.
- Winderl, Thomas., 2014. *Disaster Resilience Measurements Stocktaking Of Ongoing Efforts In Developing Systems For Measuring Resilience*. United Nations Development Programme.
- Words Into Action Guildelines, *National Disaster Risk Assessment., Governance System, Methodologies, And Use Of Results.*, 2017., UNISDR.

LAMPIRAN

Author Profile



HIERONYMUS SOERJATISHANTA

Universitas Lampung

Administrative Law

SINTA ID : 5995528

Subjects/Areas:

■ ID

Law



0.17

Overall Score

45637

Rank in National

469

Rank in Affiliation

0.04

3 Years Score

32480

3 Years National

287

3 Years Affiliation

Rank

Rank

0

Books

0

IPR

Scopus[®]

Research Output

0

Journal Articles

0

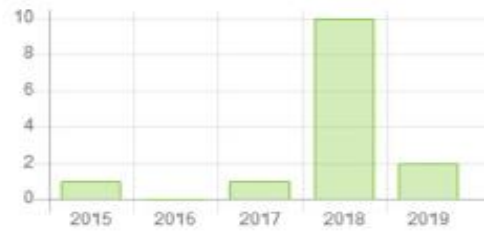
Book Chapters

0




Conference Papers

Documents per Year **Scopus[®]**

Citations per Year **Google**



Documents per Year **WEB OF SCIENCE[®]**

Score	Documents	Citations	H-Index	i10-Index
	0	0	0	0
	24	15	3	0
	0	-	-	-

Top 5 Papers by Citations	Citation
Ruang terbuka hijau Kota Metro Lampung dan pandangan aspek keagamaan Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 31 (1), 55-80 vol: 1 issue : 1 2016	4
Land Acquisition in Accelerating and Expansion of Indonesia's Economic Development Program: A Review of Law, Moral and Politic Relations, South East Asia Journal of Contempo ... Economics and Law 7 (4), 18-23 vol: 1 issue : 1 2015	4
Algoritma Peraturan Daerah Penataan Desa Untuk Mewujudkan Desa Yang Maju Dan Berdaya Saing Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 19 (2), 215-230 vol: 1 issue : 1 2017	3
Land Acquisition in Accelerating and Expansion of Indonesia's Economic Development Program: A Review of Law, Moral and Politic Relations, South East Asia Journal of Contemporary Business Economics and Law 7 (4), 18-23 vol: 1 issue : 1 2015	1
Modal Sosial dan Komunitas Agama sebagai Pendukung Instrumen Hukum dalam Pengelolaan Sampah di Kota Metro AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam 19 (2), 264-286 vol: 1 issue : 1 2014	1



Copyright © 2017
 Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
 (Ministry of Research, Technology, and Higher Education of Republic Of Indonesia)
 All Rights Reserved.




Author Profile



FATHONI
Universitas Lampung
Administrative Law
SINTA ID : 5989149
Subjects/Areas:
ID
Law

	0 Overall Score	110875 Rank in National	859 Rank in Affiliation
	0 3 Years Score	110697 3 Years National Rank	859 3 Years Affiliation Rank
	0 Books	0 IPR	
	0 Research Output	0 Book Chapters	0 Conference Papers



Score	Documents	Citations	H-Index	i10-Index
				
Scopus	0	0	0	0
	7	0	0	0
	0	-	-	-

Top 5 Papers by Citations

Citation

Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal Jurnal Cita Hukum 2 (2) vol: 1 issue : 1 2014	0
Learning Environmental Rights, Finding Green Future: The Road To Ecojustice Journal of Law, Policy and Globalization 21, 28-35 vol: 1 issue : 1 2014	0
MELAWAN MITOS PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN PENDEKATAN LINGKUNGAN PROFETIK Nizham Journal of Islamic Studies 4 (2), 192-204 vol: 1 issue : 1 2016	0
MELAWAN MITOS PARADIGMA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN PENDEKATAN LINGKUNGAN PROFETIK Farhoni Universitas Lampung NIZHAM: JURNAL STUDI KEISLAMAN 5 (2), 204-217 vol: 1 issue : 1 2016	0
Legal Framework Kebutuhan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 18 (1), 1-16 vol: 1 issue : 1 2016	0



Copyright © 2017
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
(Ministry of Research, Technology, and Higher Education of Republic Of Indonesia)
All Rights Reserved.

**BIODATA PENELITI
PENELITIAN UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNGTAHUN 2019**



Data Diri:

Nama Lengkap : Fathoni, S.H., M.H.
NIP : 19820826 201404 1 001
NIDN : 0226088201
Tempat dan Tanggal Lahir : Teluk Betung, 26 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pangkat-Gol/Jabatan Fungsional : Penata Muda Tk.I, III/b /Asisten Ahli
Bidang Keahlian : Ilmu Hukum
Jabatan Struktural : -
Alamat Kantor : Jurusan : Ilmu Hukum Administrasi
Negara :
Fakultas : Hukum Universitas Lampung
Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar
Lampung, 35145
Nomor Telepon/Faks :
Telp./Fax : 0721-704623
Email : fathoni@fh.unila.ac.id
HP : 081369403439

Jenjang Pendidikan : S1
Tahun Lulus : 2006
Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Universitas
Lampung
Kota/Negara : Bandar Lampung,
Indonesia
Judul Skripsi : Kebijakan Perizinan Bidang
Usaha Kecil di Kota
Bandar Lampung

: S2
Tahun Lulus : 2010
Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Universitas
Diponegoro
Kota/Negara : Semarang, Indonesia
Judul Thesis : Upaya Pemerintah Provinsi
Lampung dalam
Perlindungan Pengetahuan
Tradisional dan Ekspresi
Budaya Tradisional

: S3
Tahun Lulus : -
Jurusan/Fakultas : -

Kota/Negara : -
Judul Disertasi :-

Mata Kuliah yang diampu :

1. Hukum Administrasi Negara;
2. Hukum Tenaga Kerja;
Lingkungan
3. Hukum Sumberdaya Alam
4. Hukum Perizinan
5. HAPTUN
6. Hukum

Publikasi Jurnal Terakreditasi:

1. Fathoni, "Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal", *Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember 2014*
2. Fathoni, "Melawan Mitos Paradigma Pembangunan Berkelanjutan Dengan Pendekatan Lingkungan Profetik", *Jurnal NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016*
3. Tisnanta, J Reinaldo, Fathoni, "The Dilemma of Indonesia Welfare State Challenge of Realizing Social Welfare in The Global Era", *Jurnal FIAT JUSTISIA Vol 3 No. 11, Februari 2018*
4. Fathoni, H.S. Tisnanta, "Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi Di Provinsi Lampung" *Jurnal Hukum Peratun, Vol 1 No.1, April 2018*
5. Fathoni, H.S. Tisnanta, "Memahami Pancasila sebagai Bagian Tafsir Ajaran Islam. Dalil Teks dan Konteks", *Jurnal NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018*

Publikasi Jurnal Internasional 2 Tahun Terakhir:

1. Muhammad Akib, **Fathoni**, *Learning Environmental Rights, Finding Green Future: The Road to Ecojustice*, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 21, 2014.

Publikasi Buku 2 Tahun Terakhir:

No	Judul Buku	Tahun	Penerbit
1	Mengawal Spirit Konstitusi Hijau (Monograf)	2015	Indepth Publishing, Bandar Lampung
2	Membangun Paradigma Kemaritiman Indonesia (Monograf)	2015	Sai Wawai Publishing, Bandar Lampung
3	Dari Oedin ke Ridho (Monograf)	2014	Indepth Publishing, Bandar Lampung

Bandar
Lampung, Maret 2019



Fathoni, S.H., M.H

**FORMAT BIODATA PENELITI
PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2019**



Data Diri:

Nama Lengkap : Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H.
NIP : 19610930198702 1 001
NIDN : [0030096102](https://doi.org/10.30605/0030096102)
Tempat dan Tanggal Lahir : Boyolali, 30 September 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pangkat-Gol/Jabatan Fungsional : Pembina Tk.I – IV/a/Lektor Kepala
Bidang Keahlian : Ilmu Hukum
Jabatan Struktural : -
Alamat Kantor : Jurusan : Ilmu Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum Universitas Lampung
Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar
Lampung, 35145
Nomor Telepon/Faks : Telp./Fax : 0721-704623
Email : eronymus.soerjatisnanta@fh.unila.ac.id

Jenjang Pendidikan

: S1
Tahun Lulus : 1985
Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum Undip
Kota/Negara : Semarang, Indonesia
Judul Skripsi : Fungsi Dwifungsi ABRI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

: S2
Tahun Lulus : 1998
Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum Universitas Airlangga
Kota/Negara : Surabaya, Indonesia
Judul Thesis : Keterbukaan Pemerintah Daerah dalam Penerbitan Izin

: S3
Tahun Lulus : 2012
Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum Undip
Kota/Negara : Semarang, Indonesia
Judul Disertasi : Progresifitas Pembentukan Perda yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat

Mata Kuliah yang diampu :

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|
| 3. Hukum Administrasi Negara; | 3. Logika | 5. HAPTUN |
| 4. Hukum Tenaga Kerja; | 4. Hukum Perizinan | 6. Teori Hukum |

No	Tahun	Judul Penelitian
		Pertanian Organik
2	2017	Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanggamus
3	2016	Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan
4	2015	Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Metro tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
5	2013	Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda (Tahun ke-3)
6	2013	<i>Pro Poor Model</i> Dalam Perumusan Perda yang Berorientasi Pada Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Dasar
7	2013	Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda (Tahun ke-2)
58	2012	Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Provinsi Lampung Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda (Tahun ke-1)

Publikasi Jurnal Terakreditasi 2 Tahun terakhir:

1. Law Function As Instrument To Build a Stability of Moral Economy in Globalization Era International Multidisciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS), Vol. 1, 2015
2. Ruang terbuka hijau Kota Metro Lampung dan pandangan aspek keagamaan, Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 31 (1), 2016
3. Legal Framework Kebutuhan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 (1), 2016
4. Algoritma Peraturan Daerah Penataan Desa Untuk Mewujudkan Desa Yang Maju Dan Berdaya Saing, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 (2), 2017
5. The Composition Of Land Saving Model Regulation: Eforts To Reduce Conflict In Land Acquisition For Public Interests, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 13 (4), 2017
6. Hukum dan Bahasa: Refleksi dan Transformasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, JurnalLentera Hukum, Vol. 5 (2), 2018
7. The Dilemma of Indonesia Welfare State Challenge of Realizing Social Welfare in the Global Era, JurnalFIAT JUSTISIA, Vol. 11 (3), 2018

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 2 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul
1	2018	Penyuluhan Hukum tentang Pertanian Organik
2	2017	Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana, Tanggamus

Bandar Lampung, Maret 2019

Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H.